Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 2, Mei 2026
E-ISSN: 2716-0394

PEMIKIRAN NASIONALISME ISLAM HASAN AL-BANNA

Geaby Adriani,[1] Hamzah Hasan,[2] Subehan Khalik[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: geabyadria048794@gmail.com[1]

Abstract

This study aims to analyze Hasan Al-Banna's concept of nationalism from the perspective of siyāsah syar'iyyah, particularly his understanding of nationalism, the factors that influenced his thought, and its relevance to Islamic state life. The research problem arises from the debate concerning the relationship between nationalism and Islam, particularly regarding the limits of nationalism that can be accepted within Islamic teachings. This study employs library research using juridical and normative theological (syar'i) approaches. The research sources were obtained through an examination of Hasan Al-Banna's works, books, journal articles, research findings, and other relevant literature concerning nationalism and Islamic political thought. The findings indicate that Hasan Al-Banna did not categorically reject nationalism but distinguished between nationalism that is compatible with Islamic values and nationalism characterized by excessive fanaticism and division. Acceptable nationalism includes love for the homeland, the struggle for independence from colonialism, strengthening social solidarity, and supporting the liberation of Muslim countries. His thought was influenced by religious education, activities and personal experiences, ideology, the national situation in Egypt, international circumstances, and the development of intellectual thought in Egypt. From the perspective of siyāsah syar'iyyah, Hasan Al-Banna's nationalism is framed by faith and the public interest of the Muslim community. Therefore, nationalism is not limited to geographical boundaries but is directed toward strengthening unity and implementing Islamic values in political and state life.

Keywords: *Hasan Al-Banna; Islamic Politics; Nationalism; Siyāsah Syar'iyyah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran nasionalisme Hasan Al-Banna dalam perspektif *siyāsah syar'iyyah*, khususnya mengenai konsep nasionalisme, faktor-faktor yang memengaruhi pemikirannya, serta relevansinya terhadap kehidupan bernegara dalam Islam. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya perdebatan mengenai hubungan antara nasionalisme dan Islam, terutama mengenai batas-batas nasionalisme yang dapat diterima dalam kerangka ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis dan teologis normatif (*syar'i*). Sumber penelitian diperoleh melalui penelaahan terhadap karya Hasan Al-Banna, buku, jurnal, hasil penelitian, serta literatur yang relevan dengan tema nasionalisme dan politik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasan Al-Banna tidak menolak nasionalisme secara mutlak, tetapi membedakan nasionalisme yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan nasionalisme yang bersifat fanatik serta berpotensi menimbulkan

Geaby Adriani, Hamzah Hasan, Subehan Khalik "Pemikiran Nasionalisme Islam Hasan Al-Banna" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 2 (2026): 259-274.

perpecahan. Nasionalisme yang dapat diterima mencakup kecintaan terhadap tanah air, perjuangan membebaskan negeri dari penjajahan, penguatan solidaritas masyarakat, dan pembebasan negara-negara Muslim. Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh pendidikan agama, aktivitas dan pengalaman, ideologi, situasi nasional Mesir, situasi internasional, serta perkembangan pemikiran di Mesir. Dalam perspektif *siyāsah syar'iyyah*, nasionalisme Hasan Al-Banna ditempatkan dalam kerangka akidah dan kemaslahatan umat, sehingga tidak berhenti pada batas geografis, tetapi diarahkan pada persatuan dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci: Hasan Al-Banna; Nasionalisme; Politik Islam; *Siyāsah Syar'iyyah*.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.[1] Islam, menurut banyak pemikir, mempunyai sistematika ajaran yang sangat kompleks dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kehidupan manusia.[2] Hal ini dimungkinkan karena Islam mempunyai akar sejarah yang panjang dalam proses humanisasi.[3] Dalam bidang politik, misalnya, Islam menempatkan politik sebagai sarana untuk menjaga dan mengatur urusan umat (*ri'āyah syu'ūn al-ummah*).[4] Islam dan politik yang bersifat integratif dapat ditemukan dalam pemikiran sejumlah pemikir dan politisi Muslim yang hadir dari masa ke masa dengan pemikiran dan pola perjuangan yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya adalah Hasan Al-Banna. Politik merupakan suatu hal yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena, sebagai makhluk yang bersifat *zoon politicon*, manusia senantiasa berinteraksi, saling membutuhkan, serta berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya.[5]

Nasionalisme dewasa ini banyak mendapat perhatian dan menjadi gagasan yang berkembang di berbagai belahan dunia, khususnya di kalangan masyarakat negara-negara Timur.[6] Bangsa-bangsa Timur menganggap bahwa Barat telah melecehkan keberadaan,

---

1 Muhammad Mahmuda Mulia, "Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah di Masyarakat," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 1–8.

2 Andi Safriani, "Positivisasi Syariat Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 313–322.

3 Burhanudin Rabani dan Nila Sastrawati, "Kebangkitan Islam dalam Sistem Politik di Indonesia (Studi Analisis Dampak Gerakan 212)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 1 (2021): 41–53.

4 Darmawati dan Halimah B, "Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 3 (2020): 551–560.

5 Wahid, Am Yunus, dan Anshori Ilyas, "Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam Menangani Kebakaran Hutan," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021): 19–36.

6 Darmawati dan Halimah B, "Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam," 551–560.

merendahkan martabat, dan merampas kemerdekaan mereka. Tidak hanya itu, Barat juga telah mengeksploitasi kekayaan mereka dan mengorbankan putra-putra terbaik bangsa. Imperialisme dan kolonialisme Barat yang memaksakan kehendaknya telah menimbulkan luka historis serta mendorong lahirnya kesadaran kebangsaan di kalangan bangsa-bangsa Timur.

Islam meletakkan politik sebagai salah satu cara untuk menjaga dan mengatur urusan umat (*ri'āyah syu'ūn al-ummah*). Islam dan politik tidak dapat dipisahkan karena Islam tanpa politik dapat menyebabkan kaum Muslimin kehilangan ruang untuk memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan dalam melaksanakan syariat Islam.[7] Begitu pula politik tanpa Islam hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, dan kepentingan duniawi semata, serta kosong dari aspek moral dan spiritual.[8] Oleh karena itu, politik dalam Islam memiliki kedudukan penting karena dapat menjadi sarana untuk menjaga kemerdekaan, kebebasan, serta pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.[9]

Hasan Al-Banna merupakan salah satu tokoh pembaruan pemikiran Islam sekaligus pendiri dan Mursyid 'Ām pertama Ikhwanul Muslimin. Bagi Hasan Al-Banna, pembaruan dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Pemikiran pembaruan Hasan Al-Banna didasarkan pada keyakinan bahwa Islam merupakan agama universal yang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Pemikirannya pada dasarnya mencakup lima aspek utama, yaitu agama atau moral, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Imam Hasan Al-Banna melihat bahwa para penguasa di negeri-negeri Islam telah banyak dipengaruhi oleh pemikiran Eropa, terutama ketika mereka memisahkan agama dari politik dan pemerintahan. Ia mengingatkan tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari pemisahan tersebut. Menurut Hasan Al-Banna, ketika Islam dijauhkan dari politik, administrasi pemerintahan, dan pengelolaan urusan umat, maka nilai-nilai Islam akan semakin kehilangan peran dalam kehidupan publik. Ia menilai bahwa sebagian pemerintah

---

7 Ajub Ishak, "Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 57–70.

8 Karunia, Ayu Fajri, dan Sohrah Sohrah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Politik Dinasti," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no. 2 (2022): 249–260.

9 Ki Ulya, "Perbandingan Pemilihan Kepala Negara di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia dan Fiqh Siyasah)," *Jurnal Al Qadha* 2, no. 2 (2015): 27.

dan politisi di negeri-negeri Muslim telah merusak pemahaman masyarakat terhadap Islam, melemahkan pandangan hidup Islami, serta menghilangkan keindahan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Kondisi tersebut terjadi karena kebijakan, pernyataan, dan tindakan mereka cenderung menjauhkan tujuan agama dari arah kehidupan politik.

Al-Banna melihat bahwa nasionalisme Islam dalam pemahaman politik Islam adalah nasionalisme yang dibatasi oleh akidah, bukan semata-mata oleh batas tanah dan batas geografis. Setiap jengkal tanah yang di sana terdapat seorang Muslim yang mengumandangkan kalimat "*Lā ilāha illallāh Muḥammad Rasūlullāh*" merupakan bagian dari negeri Islam yang memiliki kemuliaan, kehormatan, serta berhak mendapatkan kecintaan dan kepedulian. Atas dasar itu, umat Islam yang berada di berbagai negara, baik di Mesir, Suriah, Yordania, Irak, Pakistan, Iran, Afganistan, maupun negara-negara Muslim lainnya, dipandang sebagai bagian dari keluarga dan saudara yang harus mendapatkan perhatian serta kepedulian.

Pemikiran nasionalisme Islam Hasan Al-Banna menempatkan nasionalisme dalam kerangka nilai-nilai Islam. Imam besar Ikhwanul Muslimin ini menyatakan: "Jika nasionalisme yang mereka maksud adalah keharusan bekerja serius untuk membebaskan tanah air dari penjajah, mengupayakan kemerdekaannya, serta menanamkan makna kehormatan dan kebebasan dalam jiwa putra-putranya, maka kami bersama mereka dalam hal itu. Jika nasionalisme yang mereka maksud adalah memperkuat ikatan antaranggota masyarakat di satu wilayah dan membimbing mereka menemukan cara pemanfaatan kokohnya ikatan untuk kepentingan bersama, maka kami juga sepakat dengan mereka."

Hasan Al-Banna berpendapat bahwa sesungguhnya dalam Islam terdapat politik yang orientasinya adalah kebahagiaan dunia dan kebijakan untuk kehidupan akhirat. Ia menolak anggapan bahwa Islam tidak membahas persoalan politik dan menyatakan bahwa orang-orang yang berpendapat demikian telah menzalimi diri sendiri serta menunjukkan keterbatasan dalam memahami Islam. Menurutnya, kesalahan kaum Muslimin pada masa itu adalah melupakan Islam dan memisahkan urusan agama dari politik, meskipun secara teoritis Hasan Al-Banna tidak dapat mengabaikan kenyataan

bahwa undang-undang yang berlaku, khususnya di Mesir, menegaskan bahwa agama resmi negara adalah Islam.[10]

Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti memandang perlu melakukan telaah lebih lanjut mengenai pemikiran nasionalisme Islam Hasan Al-Banna dalam perspektif *siyāsah syar'iyyah*. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana Hasan Al-Banna mengonstruksi konsep nasionalisme dalam kerangka ajaran Islam serta bagaimana pemikiran tersebut dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *siyāsah syar'iyyah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*).[11] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan yuridis dan pendekatan teologis normatif (*syar'i*), dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.[12] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.[13] Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian, dokumen-dokumen, serta buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.[14] Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan menghasilkan kesimpulan yang tepat sesuai dengan fokus penelitian.[15]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nasionalisme Perspektif Hasan Al-Banna

Palestina adalah sebuah nama untuk menyebut wilayah Barat Daya negeri Syam. Sebuah wilayah yang terletak di Bagian Barat Benua Asia dan Bagian Pantai Timur Laut Tengah. Palestina terletak di titik strategis penting, karena dianggap sebagai penghubung

---

[10] Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Fikih Politik Hasan Al Banna* Media Insani Publishosng Solo, 2005 (Jurnal Alwat Khoebillah Dan Humanior 4. No. 1 (2018): 30-31.

[11] Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 30–43.

[12] Kusnadi Umar, "Menyoal Netralitas RT/RW pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020," *Petitum* 9, no. 1 (2021): 78–87.

[13] Kusnadi Umar, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 114–129.

[14] Jamila Mifthahul Jannah And Halimah Basri, "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, No. 2 (2020): 308-317.

[15] Miftahul Fauzy Haerul Saleh Dan Halimah Basri, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kotamakassar," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, No. 1 (2019): 31.

antara Benua Asia dan Afrika, di samping sebagai sentra yang mempertemukan wilayah dunia Islam.[16] Wilayah ini pada zaman tersebut adalah wilayah kan'an karena pada zaman itu dimukim oleh bangsa kan'an yang datang dari jazirah Arab sekitar 2500 tahun SM.

Nasionalisme menjadi salah satu isu yang menarik perhatian dan menimbulkan perdebatan di kalangan berbagai gerakan Islam. Kelompok yang menentang nasionalisme menjelaskan bahwa menjelang dan setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924, Barat memperkenalkan berbagai gagasan nasionalisme dan kesukuan. Ide nasionalisme dipandang dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat terbentuknya kembali Khilafah Islamiyah. Dalam menyikapi persoalan nasionalisme tersebut, Imam Besar Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, menyatakan: "Jika nasionalisme yang mereka maksud adalah keharusan bekerja serius untuk membebaskan tanah air dari penjajah, mengupayakan kemerdekaannya, serta menanamkan makna kehormatan dan kebebasan dalam jiwa putra-putranya, maka kami bersama mereka dalam hal itu. Jika nasionalisme yang mereka maksud adalah memperkuat ikatan antaranggota masyarakat di satu wilayah dan membimbing mereka menemukan cara pemanfaatan kokohnya ikatan untuk kepentingan bersama, maka kami juga sepakat dengan mereka. Karena Islam menganggap itu sebagai kewajiban yang tidak dapat ditawar."[17]

Nasionalisme muncul pada akhir abad ke-18 dalam suasana liberalisme di antara bangsa-bangsa Eropa yang merasa perlu menegaskan identitas dan kesamaan derajatnya dengan Inggris dan Prancis yang pada waktu itu dianggap sebagai negara-negara yang paling maju.[18] Perkembangan tersebut kemudian memengaruhi dinamika politik dan sosial di berbagai wilayah dunia, termasuk negara-negara Muslim yang mengalami kolonialisme dan berhadapan dengan gagasan mengenai identitas kebangsaan.

Nasionalisme Hasan Al-Banna tidak berorientasi pada politik transaksional dan pragmatis. Keterlibatan dalam parlemen atau menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan pemerintahan dipandang sebagai strategi dan taktik dalam perjuangan politik. Pandangan tersebut memiliki relevansi dengan keberadaan partai-partai politik berbasis Islam di Indonesia yang menjadikan politik sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Beberapa di antaranya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa

[16] Tim kajian dakwah alhikmah, "Sejarah Palestina Dan Rakyatnya (Bag Ke-1): Tanah Palestina," n.d.
[17] Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiah Al-Hikmah, "Nasionalisme di Mata Hasan Al-Banna," *Alhikmah*, diakses 20 November 2023.
[18] Sunarso, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 47.

(PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai-partai bernuansa Islam tersebut melibatkan tokoh-tokoh agama dan memiliki orientasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta memperoleh keridaan Allah melalui jalur politik dan parlemen.

Menurut Hasan Al-Banna, setidaknya terdapat lima kategori nasionalisme yang dapat diterima serta memiliki landasan teologis dan kesejarahan dalam Islam. Pertama, nasionalisme sebagai ekspresi kerinduan terhadap tanah air dan keinginan yang kuat untuk kembali kepadanya. Kedua, nasionalisme yang mendorong kewajiban untuk membebaskan tanah air dari penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan, serta menanamkan makna kehormatan dan kebebasan di dalamnya. Ketiga, nasionalisme kemasyarakatan, yaitu nasionalisme yang dibangun untuk memperkuat ikatan antaranggota masyarakat dan membimbing mereka menemukan cara untuk mengokohkan ikatan tersebut. Keempat, nasionalisme pembebasan, yaitu nasionalisme yang dibangun atas dasar solidaritas negara-negara Muslim yang berupaya melepaskan diri dari penjajahan. Kelima, nasionalisme sebagai ekspresi partisan, yaitu nasionalisme yang mendorong kebencian, permusuhan, dan perpecahan serta menghambat upaya kerja sama antarumat. Jenis nasionalisme yang terakhir ini merupakan bentuk nasionalisme yang harus dijauhi.[19]

2. Faktor Pendukung dan Penghalang terhadap Nasionalisme Hasan Al-Banna

Pemikiran Hasan Al-Banna tentu tidak lahir dari ruang hampa. Pemikirannya terbentuk melalui interaksi yang intens dengan lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, memahami pandangan Al-Banna mengenai nasionalisme tidak cukup hanya dengan melihat gagasan yang dikemukakannya secara tekstual, tetapi juga perlu memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan pemikirannya. Interaksi Al-Banna dengan lingkungan sosial, pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya turut membentuk pandangannya terhadap nasionalisme. Adapun faktor internal meliputi pendidikan, agama, aktivitas, ideologi, dan pengalaman.

[19] Ahmad Dzakirin, *8 Dekade Pergulatan Politik Ikhwanul Muslimin Menuju Kekuasaan,* Surakarta, 2015 H.173-174, Jurnal Al-Miskawaih Muh. Rifai, Mi Miftahul Huda Jambon Pulokulon Grobogan NurochmanBin Assayyidi Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan *Pemikiran Pendidikan Nasionalisme Hasan Al Banna* 4. No. 1 (2023): 37-38.

Sementara itu, faktor eksternal meliputi situasi politik, ekonomi, dan budaya, situasi nasional dan internasional, serta perkembangan pemikiran di Mesir pada masa tersebut.[20]

a. Faktor Intern

1) Pendidikan

Sejak dini, Al-Banna dididik dalam lingkungan yang taat beragama. Dengan latar belakang sebagai seorang sarjana agama, ayah Al-Banna sangat menekankan pendidikan agama sebagai dasar pendidikan yang diterima oleh anak-anaknya. Terlebih lagi ketika Al-Banna menjadi murid Syaikh Abu Zahrah. Pada masa tersebut, Al-Banna memiliki hubungan yang kuat dengan agama yang kemudian sangat memengaruhi pandangan keagamaannya serta cara pandangnya terhadap berbagai peristiwa yang terjadi sepanjang kehidupannya.

Pendidikan tersebut menjadikan Al-Banna semakin yakin bahwa ajaran Islam bersifat final dan sempurna. Kesempurnaan Islam tidak hanya terlihat dari cakupan ajarannya, tetapi juga dari tingkat kompatibilitasnya dengan berbagai zaman dan situasi. Selain itu, interaksi yang intens dengan dunia tasawuf membuat Al-Banna merasakan bahwa peradaban Barat cenderung mengabaikan aspek rohani dalam diri manusia. Akibatnya, kemajuan yang ditawarkan Barat dinilai lebih menekankan aspek lahiriah. Paham-paham Barat juga cenderung memandang manusia hanya dari satu sisi dan mengabaikan dimensi lainnya.

Berdasarkan pandangan tersebut, Al-Banna meyakini bahwa nasionalisme, sekalipun dalam maknanya yang positif, tetap cenderung menonjolkan satu sisi kehidupan manusia, yaitu keinginan untuk memperoleh kebebasan dan menjaga kehormatan. Padahal, Islam memberikan cakupan yang lebih luas daripada nasionalisme. Misalnya, nasionalisme menekankan rasa bangga terhadap tanah air dan kemuliaannya, sedangkan Islam tidak berhenti pada batas tersebut. Islam mengajarkan manusia untuk memiliki kepedulian terhadap saudara seakidah yang berada di luar batas-batas teritorial. Pandangan inilah yang kemudian memengaruhi cakupan nasionalisme Al-Banna yang melampaui batas wilayah dan mencakup seluruh dunia Islam.[21]

2) Aktivitas dan Pengalaman

[20] Khairul Umam, *Nasionalisme dalam Perspektif Hasan Al-Banna* (2015), 51.
[21] Khairul Umam, *Nasionalisme dalam Perspektif Hasan Al-Banna* (2015), 53.

Sebagai seorang guru, Al-Banna memiliki kemampuan dalam memahami dan menganalisis jiwa manusia. Kemampuan tersebut penting bagi seorang guru karena berkaitan langsung dengan cara mengenali karakter serta menentukan metode pendidikan yang tepat bagi peserta didik. Profesi sebagai guru juga membiasakan Al-Banna untuk memperhatikan dan menganalisis perilaku manusia.

Keikutsertaan Al-Banna pada masa muda dalam demonstrasi tahun 1919 M juga memberikan warna tersendiri dalam pembentukan pandangannya terhadap nasionalisme. Demonstrasi tahun 1919 yang disebut-sebut didorong oleh semangat nasionalisme memang berhasil mengakhiri okupasi Inggris atas Mesir. Namun, demonstrasi besar-besaran tersebut belum mampu memberikan kebebasan yang sesungguhnya bagi Mesir. Lebih jauh, perjuangan yang dilandasi semangat nasionalisme menunjukkan keterbatasannya dalam membebaskan Mesir secara menyeluruh. Hal tersebut terlihat dari masih kuatnya pengaruh Inggris terhadap Mesir, terutama dalam bidang ekonomi dan kepentingan mereka di wilayah Sungai Nil.

Selain itu, berbagai perjanjian dan bentuk perlawanan atas nama nasionalisme pada masa-masa berikutnya, seperti Anglo-Egyptian Treaty dan persoalan penjajahan Israel atas wilayah Mesir, semakin menunjukkan keterbatasan nasionalisme dalam membebaskan tanah-tanah umat Islam. Bahkan, atas dasar nasionalisme, sebagian kalangan elite Mesir memandang Palestina bukan sebagai bagian dari persoalan nasional Mesir. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa doktrin tanah air dan bangsa dapat mempersempit kepedulian umat Islam terhadap saudara seiman dengan membatasinya pada wilayah teritorial tertentu, yang dalam banyak kasus merupakan hasil pembagian yang dibentuk oleh kepentingan kolonial. Hal inilah yang turut memberikan kekhasan pada pandangan Al-Banna mengenai nasionalisme, yaitu nasionalisme yang batas-batas solidaritasnya didasarkan pada akidah, bukan semata-mata pada wilayah teritorial.

3) Ideologi

Terdapat beragam penilaian terhadap Al-Banna sebagai seorang pemikir dan tokoh ideologi. Fundamentalisme dan aktivisme merupakan beberapa kategori yang pernah disematkan kepadanya. Di sisi lain, ia juga dipandang sebagai tokoh reformasi, khususnya dalam lingkungan dakwah. Apa pun kategori yang disematkan kepadanya, satu hal yang

tidak dapat diragukan adalah bahwa Al-Banna memandang Islam sebagai agama yang *kāffah*. Berangkat dari pemahaman tersebut, istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan orientasi pemikirannya adalah ideologi yang berlandaskan Islam.

b. Faktor Ekstern

1) Situasi Nasional Mesir

Dalam konteks ini, situasi nasional Mesir mencakup kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang berkembang di Mesir pada masa tersebut. Sebagaimana diketahui, Mesir pada abad ke-20 merupakan wilayah yang mengalami perkembangan pesat berbagai gagasan yang berasal dari Barat. Dalam bidang politik berkembang gagasan konstitusionalisme, nasionalisme, demokrasi, komunisme, dan lain sebagainya. Dari sisi ekonomi berkembang gagasan kapitalisme dan sosialisme. Sementara itu, dalam bidang budaya berkembang gagasan feminisme, liberalisme, sekularisme, hedonisme, dan ateisme.

Paham-paham tersebut menjadikan ekspresi kehidupan keagamaan masyarakat Mesir semakin beragam sekaligus semakin menjauh dari nilai-nilai Islam. Mesir yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pusat ilmu-ilmu keislaman mulai dibanjiri oleh berbagai pemikiran Barat. Namun, perkembangan pemikiran tersebut tidak selalu menghasilkan kemajuan bagi kehidupan masyarakat. Sebaliknya, dekadensi moral, krisis ekonomi, dan krisis politik yang sebelumnya tidak terbayangkan justru turut menyelimuti kehidupan Mesir.[22]

Kegagalan konstitusionalisme dan tetap dipertahankannya sistem monarki yang berada di bawah pengaruh Inggris di Mesir semakin memperlihatkan bahwa Inggris tidak memiliki kepentingan yang sepenuhnya berpihak kepada Mesir. Sikap Inggris dinilai lebih didasarkan pada kepentingan mereka sendiri. Ketika kepentingan tersebut terpenuhi, hubungan dapat dipertahankan, tetapi ketika kepentingan tersebut tidak lagi terpenuhi, berbagai kepentingan kolonial kembali ditunjukkan. Kondisi tersebut membuat Al-Banna semakin meyakini bahwa sistem Barat tidak selalu seindah sebagaimana yang digambarkan oleh para pendukungnya. Demikian pula dengan nasionalisme yang menurutnya kerap digunakan sebagai sarana untuk menutupi kepentingan kelompok atau

[22] Khairul Umam, *Nasionalisme dalam Perspektif Hasan Al-Banna* (2015), 58.

kepentingan pribadi. Bahkan, atas nama pembebasan tanah air dan penguatan identitas "kemesiran", sebagian kalangan rela menghidupkan kembali simbol-simbol sejarah Mesir kuno.

2) Situasi Internasional

Semasa hidupnya, Al-Banna mengalami dua perang besar yang tidak hanya menghancurkan negara-negara Eropa, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap negara-negara di Asia. Pertama, Perang Dunia I yang berlangsung pada tahun 1914–1918 M dan terjadi ketika Al-Banna masih berada pada masa remaja.

Kedua, Perang Dunia II yang berlangsung pada tahun 1939–1945 M dan terjadi ketika Al-Banna telah beranjak dewasa. Kedua perang tersebut sering dikaitkan dengan fanatisme kebangsaan yang berlebihan, di samping berbagai faktor lainnya. Pada masa itu, bangsa Jerman memandang ras Arya sebagai ras yang superior dibandingkan dengan ras lainnya di dunia. Pandangan rasial tersebut terus diindoktrinasikan kepada masyarakat Jerman hingga secara perlahan diterima oleh sebagian besar masyarakat atau setidaknya tidak mendapatkan penolakan secara terbuka.

Akibatnya, fanatisme kebangsaan tersebut berkembang menjadi salah satu legitimasi bagi peperangan yang dilakukan pada masa itu. Dengan landasan pemikiran yang bersifat fanatik, pembunuhan terhadap jutaan manusia memperoleh pembenaran. Persaingan antarnegeri dianggap perlu untuk menunjukkan bangsa mana yang benar-benar maju dan superior dibandingkan bangsa lainnya. Bahkan, apabila persaingan tersebut harus ditempuh dengan merugikan negara lain, tindakan tersebut dianggap dapat dibenarkan. Kondisi semacam inilah yang menurut Al-Banna membuat ikatan di antara kelompok-kelompok masyarakat menjadi renggang dan melemah sehingga memberikan kesempatan kepada musuh untuk menghancurkan umat melalui tangan saudara mereka sendiri.[23]

3) Perkembangan Pemikiran di Mesir

Sepanjang abad ke-20, Mesir tidak terlepas dari perdebatan mengenai posisi Islam dalam kehidupan bernegara. Perdebatan tersebut berlangsung dalam berbagai lini, baik di antara sarjana yang memperoleh pendidikan Barat, antara sarjana Barat dan sarjana Islam,

[23] Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Auraq Min Tarikh Al-Ikhwan Al-Muslimin: Dhuruf An-Nasy'ah wa Syakhshiyah Al-Imam Al-Mu'assis*, terj. Bobby Herwibowo, 4–5.

maupun di antara sesama sarjana Barat. Perdebatan mengenai posisi Islam dalam kehidupan masyarakat Mesir bahkan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan elite hingga masyarakat umum.

Gagasan sekularisme dan materialisme berkembang seiring dengan proses westernisasi di Mesir. Al-Banna mengecam kelompok nasionalis karena dipandang membawa pandangan sekular dan berusaha memisahkan Islam dari kehidupan masyarakat Mesir. Dalam pandangan Al-Banna, terdapat kelompok yang memandang Islam berada pada satu sisi, sementara prinsip nasionalisme berada pada sisi yang lain dan dianggap berseberangan satu sama lain.

Menurut Al-Banna, nasionalisme tidak harus mencari dasar pemikirannya dari pandangan sekular karena Islam juga dapat menjadi dasar bagi nasionalisme. Pemikiran yang memisahkan persoalan pribadi dan publik secara tegas dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, seorang Muslim tetap dapat menjadi seorang nasionalis, dengan catatan bahwa nasionalisme tersebut dimaknai dalam kerangka nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam.

4) Eksistensi Nasionalisme Hasan Al-Banna terhadap Negara Islam

Pada awal abad ke-20, semangat nasionalisme mulai berkembang di wilayah Asia dan Afrika. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Turki, yang pada masa itu merupakan bagian dari dunia Islam, turut mengalami perkembangan gagasan nasionalisme. Kemunculan gagasan nasionalisme di Turki kemudian berhadapan dengan konsep *al-rābiṭah al-Islāmiyyah* atau persatuan Islam. Di dunia Islam bagian Timur, pemikiran tersebut terus berkembang. Sathi' Al-Hisry, misalnya, menyerukan nasionalisme Arab. Di Mesir berkembang aliran yang menyerukan nasionalisme Mesir dan menumbuhkan rasa kesukuan dalam tubuh umat yang berlandaskan pada ras, bukan pada akidah dan agama. Pada masa tersebut juga muncul berbagai seruan nasionalisme yang mengajak bangsa-bangsa untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan dari penjajahan Barat.

Dalam situasi tersebut, Hasan Al-Banna tumbuh dengan pengalaman pahit ketika negeri dan rakyat Mesir berada di bawah penguasaan penjajah Barat yang berlaku

sewenang-wenang terhadap rakyatnya.[24] Dunia Islam pada masa itu berada dalam kondisi kemunduran dan mencapai salah satu titik penting setelah kekalahan sekaligus perubahan arah politik Turki Utsmani menuju sistem pemerintahan yang berorientasi Barat pada tanggal 3 Maret 1924.[22]

Pemikiran Hasan Al-Banna tentang negara sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik ketika Khilafah Turki Utsmani runtuh sehingga umat Islam tidak lagi memiliki kekuatan formal yang dapat mempersatukan visi dan misi mereka. Umat Islam kemudian terjebak dan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari sistem pemerintahan yang diadopsi dari Barat. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap suatu negara Islam yang mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam dipandang semakin mendesak sebagai sarana untuk mempersatukan umat Islam.[23] Setelah menyadari pentingnya pembentukan negara, Hasan Al-Banna berpandangan bahwa bentuk pemerintahan yang ideal adalah Khilafah. Urgensi Khilafah tersebut, menurutnya, dapat dilihat dari sikap para sahabat Nabi Muhammad saw. yang mendahulukan pembicaraan mengenai kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah saw. Hadis-hadis yang membahas kewajiban memilih imam serta hukum-hukum mengenai imamah juga dipandang sebagai bukti bahwa umat Islam perlu memberikan perhatian terhadap persoalan Khilafah.[24]

Khilafah yang dimaksudkan Hasan Al-Banna harus mampu mengoordinasikan seluruh negara Muslim. Polanya adalah negara-negara Muslim yang menyepakati pembentukan Khilafah bermusyawarah untuk memilih seorang mediator atau pemimpin yang disepakati sebagai pengoordinasi kepentingan umat. Khilafah dalam perspektif Hasan Al-Banna terbentuk melalui koordinasi negara-negara Muslim yang sepakat menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, Khilafah lebih berfungsi sebagai lembaga koordinatif, sementara kekuasaan para penguasa di masing-masing negara Muslim tetap eksis. Keberadaan Khilafah dalam konteks ini diarahkan untuk mewujudkan penerapan prinsip-prinsip Islam di negara-negara Muslim secara bertahap. Berdasarkan pemikiran tersebut, bentuk pemerintahan Islam dalam perspektif Hasan Al-Banna memiliki sifat yang cukup fleksibel. Pemahaman yang tidak kaku tersebut menyebabkan Hasan Al-

[24] Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, ed. I, cet. I (Jakarta: Kencana, 2010), 198.

Banna lebih banyak memberikan dukungan moral terhadap pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan di Mesir.[25]

Dari tulisan-tulisan Hasan Al-Banna, tidak ditemukan pembahasan yang secara spesifik dan sistematis mengenai bentuk negara secara umum. Pemikirannya lebih banyak diarahkan pada upaya menyoroti paham atau ideologi yang berkembang dalam suatu negara, seperti paham sekularisme Kemal Atatürk di Turki maupun berbagai aliran sosial-politik yang memperoleh dukungan fanatik. Islam sebagai sebuah sistem nilai juga dipandang harus mampu masuk ke dalam kehidupan bernegara dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintahan.

Pada masa perkembangan Ikhwanul Muslimin, berbagai pihak pernah mengajukan pertanyaan kepada Hasan Al-Banna mengenai apakah pembentukan pemerintahan dan penegakan hukum merupakan bagian dari program Ikhwanul Muslimin serta sarana apa yang dapat digunakan untuk mewujudkannya. Mengenai hal tersebut, Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa setiap perencanaan, langkah kerja, dan penetapan target Ikhwanul Muslimin senantiasa dilaksanakan berdasarkan petunjuk Islam. Menurutnya, agama Islam yang diyakini oleh Ikhwanul Muslimin menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilar bangunannya. Pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengarahan dan pemberian nasihat, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks tersebut, Hasan Al-Banna mengutip perkataan Khalifah Utsman bin Affan bahwa Allah mencegah melalui kekuasaan sesuatu yang tidak dapat dicegah melalui Al-Qur'an.[26]

Berangkat dari keteladanan Rasulullah saw. yang menjadikan pemerintahan sebagai salah satu bagian dari bangunan kehidupan Islam, Hasan Al-Banna memandang bahwa Islam mencakup hukum dan pengalaman kehidupan sebagaimana ia mencakup undang-undang, ajaran, peraturan, dan keputusan. Dengan demikian, berbagai aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

---

[25] Hasan Al-Banna, *Al-Rasa'il*, terj. Fatimah Az-Zahra, *Wasiatku kepada Tunas-Tunas Muda Ikhwan* (t.k.: Asaduddin Press, 1996), 87–88.

[26] Hasan Al-Banna, *Majmu'ah Rasail Al-Imam As-Syahid Hasan Al-Banna*, terj. Anis Matta, Rofi' Munawar, dan Wahid Ahmadi, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 1* (Solo: Era Intermedia, 2011), 247–248.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Hasan Al-Banna tidak menolak nasionalisme secara keseluruhan, tetapi membedakannya berdasarkan nilai, tujuan, dan orientasinya. Nasionalisme dapat diterima apabila diwujudkan dalam kecintaan terhadap tanah air, perjuangan melawan penjajahan, penguatan ikatan sosial, dan solidaritas terhadap masyarakat Muslim yang tertindas. Sebaliknya, nasionalisme yang berlandaskan fanatisme, kepentingan kelompok, kebencian, dan perpecahan bertentangan dengan prinsip persatuan Islam. Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh pendidikan keagamaan, pengalaman dan aktivitas Al-Banna, orientasi Islam sebagai agama yang *kāffah*, serta kondisi politik Mesir, kolonialisme, dan perkembangan sekularisme. Dalam perspektif *siyāsah syar'iyyah*, nasionalisme Hasan Al-Banna berlandaskan akidah dan kemaslahatan umat, sehingga tidak terbatas pada wilayah geografis. Dengan demikian, nasionalisme dipandang sebagai instrumen perjuangan untuk mewujudkan persatuan, kemerdekaan, kemaslahatan, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Mulia, Muhammad Mahmuda. "Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah di Masyarakat." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021).

Safriani, Andi. "Positivisasi Syariat Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018).

Rabani, Burhanudin dan Nila Sastrawati. "Kebangkitan Islam dalam Sistem Politik di Indonesia (Studi Analisis Dampak Gerakan 212)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 2, no. 1 (2021).

Darmawati dan Halimah B. "Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 3 (2020).

Wahid, Am Yunus dan Anshori Ilyas. "Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam Menangani Kebakaran Hutan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021).

Ishak, Ajub. "Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017).

Karunia, Ayu Fajri dan Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Politik Dinasti." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 3, no. 2 (2022).

Ulya, Ki. "Perbandingan Pemilihan Kepala Negara di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia dan Fiqh Siyasah)." *Jurnal Al Qadha* 2, no. 2 (2015).

Umar, Kusnadi. "Menyoal Netralitas RT/RW pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *Petitum* 9, no. 1 (2021).

Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020).

Jannah, Jamila Mifthahul dan Halimah Basri. "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa."

Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah 2, no. 2 (2020).

Saleh, Miftahul Fauzy Haerul dan Halimah Basri. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah* 1, no. 1 (2019).

Rifai, Muh., Miftahul Huda Jambon Pulokulon Grobogan dan Nurochman bin Assayyidi. "Pemikiran Pendidikan Nasionalisme Hasan Al Banna." *Al-Miskawaih: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2023).

Buku

Faris, Abu, Muhammad Abdul Qadir. *Fikih Politik Hasan Al Banna.* Solo: Media Insani Publishing, 2005.

Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah.* Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Dzakirin, Ahmad. *8 Dekade Pergulatan Politik Ikhwanul Muslimin Menuju Kekuasaan.* Surakarta, 2015.

Umam, Khairul. *Nasionalisme dalam Perspektif Hasan Al-Banna.* 2015.

Aziz, Jum'ah Amin Abdul. *Auraq Min Tarikh Al-Ikhwan Al-Muslimin: Dhuruf An-Nasy'ah wa Syakhshiyah Al-Imam Al-Mu'assis.* Terjemahan Bobby Herwibowo.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer.* Edisi I, cetakan I. Jakarta: Kencana, 2010.

Al-Banna, Hasan. *Al-Rasa'il.* Terjemahan Fatimah Az-Zahra. *Wasiatku kepada Tunas-Tunas Muda Ikhwan.* t.k.: Asaduddin Press, 1996.

Al-Banna, Hasan. *Majmu'ah Rasail Al-Imam As-Syahid Hasan Al-Banna.* Terjemahan Anis Matta, Rofi' Munawar, dan Wahid Ahmadi. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid 1.* Solo: Era Intermedia, 2011.

Sunarso. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.

Web

Tim Kajian Dakwah Al-Hikmah. "Sejarah Palestina dan Rakyatnya (Bag. Ke-1): Tanah Palestina." Diakses [tanggal akses].

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiah Al-Hikmah. "Nasionalisme di Mata Hasan Al-Banna." *Alhikmah*. Diakses 20 November 2023.